



Tajuddin, PEH Muda pada BPHL Wilayah XIII

Pendahuluan

Hasil hutan bukan kayu (HHBK) memiliki peran yang cukup besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar hutan serta menjaga kelestarian hutan (Pusat Litbang Kehutanan, 2010). Pada aspek ekonomi, HHBK dapat menjadi sumber mata pencaharian yang memberikan pendapatan bagi masyarakat (Kartila et al., 2018). Selanjutnya pada aspek konservasi dan kelestarian hutan, pohon HHBK pada umumnya terjaga dari kegiatan penebangan sehingga menjaga fungsi perlindungan tata air.

Secara khusus di wilayah Sulawesi Selatan, salah satu produk HHBK yang sangat penting bagi masyarakat adalah kemiri (*Aleurites Moluccana* (L.) Willd). Keberadaan kemiri telah cukup lama dan dimanfaatkan baik untuk keperluan komersial maupun subsisten (Krisnawati dkk., 2011). Selain penanaman kemiri yang dilakukan oleh masyarakat, pengembangan kemiri khususnya yang berada di dalam kawasan hutan adalah merupakan hasil tanaman reboisasi yang digencarkan pada periode 1980-1990an. Kelestarian hutan kemiri di Sulawesi Selatan

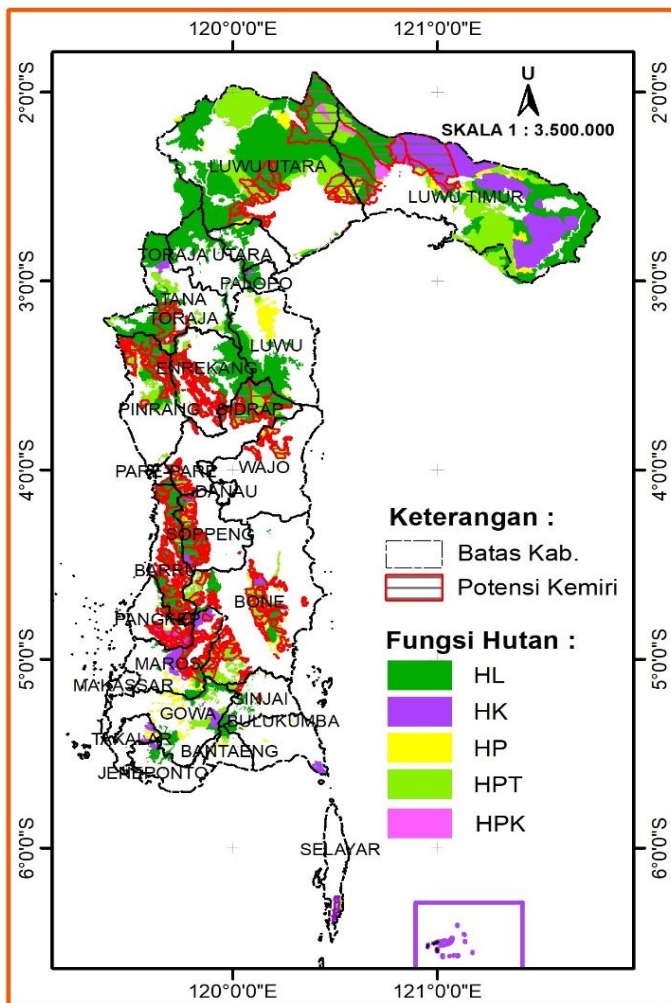
disebabkan nilai ekonomi kemiri yang cukup tinggi baik sebagai penyedap makanan maupun sebagai bahan baku industri dan perabot rumah tangga. Hal ini didukung oleh prospek pasar yang cukup luas baik di dalam maupun di luar negeri (Yusran, 2005).

Prospek dan manfaat yang cukup besar dari produk kemiri ternyata tidak dibarengi dengan tata kelola perusahaan kemiri yang berpihak pada masyarakat. Permasalahan utama adalah keberadaan kemiri yang berada di dalam kawasan hutan telah berdampak pada sulitnya peremajaan kemiri tua dan tidak produktif (Yusran, 2005; Wakka dkk., 2013). Selain itu, pendapatan masyarakat dari kemiri sebenarnya memberikan keuntungan lahan yang rendah di bandingkan dengan tanaman lain, seperti jagung. Hal ini telah memicu konversi lahan kemiri menjadi areal tanaman semusim (Rahmanulloh dkk., 2013). Artikel ini memberi sedikit gambaran tentang pemanfaatan kemiri sebagai salah satu produk HHBK unggulan di Sulawesi Selatan dengan menguraikan sebaran potensinya,

urgensinya bagi penghidupan masyarakat dan beberapa permasalahan di lapangan.

Sebaran Potensi Kemiri

Pemetaan potensi tegakan kemiri menggunakan data sekunder berupa data administrasi desa yang di keluarkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2014, dan Peta kawasan hutan terakhir yang diterbitkan oleh Kementerian LHK pada tahun 2019. Selanjutnya, dilakukan overlay peta administrasi desa yang memiliki potensi pinus berdasarkan informasi dari informan dengan peta kawasan hutan menggunakan software ArcGIS. Sebaran tegakan kemiri disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta Sebaran Tegakan Kemiri di Provinsi Sulawesi Selatan

Dari Gambar 1, diperoleh informasi bahwa sebaran kemiri yang berada di dalam kawasan

hutan di wilayah Sulawesi Selatan tersebar di 15 Kabupaten/Kota dan 291 Desa (9,5 % dari jumlah Desa/Kelurahan yang ada di Sulawesi Selatan). Hutan kemiri yang berada di kawasan hutan memberi pengaruh yang signifikan terhadap produksi biji kemiri di Sulawesi Selatan. Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, produksi kemiri pada tahun 2018 sebesar 13.797 ton (angka tetap) dan tahun 2019 turun menjadi 11.393 ton (angka sementara). Kabupaten Bone, Maros, Soppeng, Enrekang dan Kabupaten Barru adalah 5 Kabupaten dengan produksi kemiri tertinggi. Nappu (2013) menyatakan bahwa Kabupaten Maros dan Bone merupakan pusat penghasil kemiri di Sulawesi Selatan.

Arti Penting Kemiri Bagi Masyarakat



Gambar 2. Hutan kemiri di Kabupaten Pinrang

Biji kemiri sebagai sumber mata pencaharian masyarakat bagi masyarakat di dalam dan disekitar kawasan hutan telah dirasakan sejak lama. Jejak sejarah kemiri di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa tanaman kemiri telah digunakan sejak masa kolonial Belanda sekitar tahun 1920-1930an untuk memperbaiki hutan yang terdegradasi akibat perladangan berpindah

(Rahmanulloh & Martini, 2013). Fakta ini memberi gambaran betapa pentingnya komoditas kemiri yang merupakan tanaman rempah dalam menjamin penghidupan masyarakat khususnya yang berada di dalam dan di sekitar hutan (A.Samsu dkk., 2022). Baharuddin dkk. (2021) dalam penelitiannya di Kabupaten Bone menyatakan bahwa komoditi kemiri merupakan sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat di kelurahan Kahu. Selanjutnya, Yusran (2005) menyimpulkan bahwa walaupun kontribusi kemiri terhadap total pendapatan rumah tangga hanya sekitar 10 – 13 % namun memiliki manfaat yang sangat strategis terhadap kelangsungan ekonomi masyarakat karena menjadi sumber dana cadangan untuk menutupi kebutuhan masyarakat. Hal ini karena biji kemiri dapat disimpan sampai dua tahun, sehingga dapat dijual ketika dibutuhkan.

Dalam sebuah wawancara penulis dengan salah satu Kepala Dusun di Desa sering Kabupaten Soppeng, beliau menyatakan bahwa jika bukan karena pohon kemiri yang terdapat di dusun mereka, maka masyarakat telah lama meninggalkan kampung tersebut karena tidak adanya sumber pendapatan lain yang dapat menjamin penghidupan masyarakat. Hal ini didukung oleh hasil pengamatan lapangan terhadap beberapa desa di Kabupaten Soppeng yang menunjukkan bahwa kemiri adalah sumber pendapatan utama bagi masyarakat dan ditunjang oleh sumber pendapatan lain seperti madu hutan dan tanaman semusim.

Permasalahan Dalam Pengembangan Kemiri

Dalam pengelolaan kemiri, permasalahan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketidakpastian penguasaan lahan karena sebagian besar lahan kemiri masyarakat berada di dalam kawasan hutan negara. Hal ini berdampak pada proses peremajaan kemiri yang menjadi terhambat, sehingga komposisi tegakan kemiri secara umum didominasi oleh tegakan tua dan kurang produktif Akibatnya, masyarakat sekitar kehilangan salah

satu sumber pendapatan pokok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Yusran, 2005; Wakka dkk., 2013).

Ketatnya regulasi yang terkait dengan peremajaan kemiri di kawasan hutan tidak hanya terjadi pada fungsi konservasi dan lindung, tetapi juga pada hutan produksi. Hal ini terjadi pada beberapa izin skema perhutanan sosial (HKm dan HTR) di Kabupaten Barru dan Soppeng. Oleh karena itu, masyarakat harus diberikan pola pengelolaan yang dapat menjamin budidaya kemiri dapat dilaksanakan dengan baik dan peremajaan tegakan dapat dilakukan ketika tanaman kemiri telah mencapai umur yang tidak produktif.

Permasalahan lain adalah rendahnya profitabilitas kemiri dibandingkan dengan komoditas lainnya. Pemanfaatan kemiri oleh masyarakat juga masih belum optimal. Masyarakat sejauh ini hanya memanfaatkan buah kemiri sebagai bahan rempah-rempah, dan kulit kemiri sebagai bahan (Baharuddin dkk., 2021). Hal ini menjadi salah satu penyebab konversi lahan menjadi areal tanaman semusim, seperti jagung (Rahmanulloh & Martini, 2013). Konversi lahan ini dikhawatirkan akan mengakibatkan risiko lingkungan di daerah tersebut. Oleh karena itu, sistem pertanian campuran seperti agroforestri sangat diperlukan untuk mengurangi risiko lingkungan dan tanpa adanya penurunan laba ekonomi yang signifikan. (Rahmanulloh dkk., 2013).

Daftar Pustaka

- A.Samsu, A. K., Mukhlisa, A. N., & Nurnawati, A. A. (2022). Identifikasi Sebaran Tanaman Kemiri Berbasis Pola Agroforestri di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. *Agro Bali : Agricultural Journal*, 5(1), 177–186. <https://doi.org/10.37637/ab.v5i1.866>
- Baharuddin, Makkarennu, & Rahmi, M. (2021). Pemanfaatan Dan Kontribusi Kemiri (Aleurites Moluccana) Sebagai Komoditi Hhbk Terhadap Pendapatan Petani Di

Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone,
Sulawesi Selatan. *Perennial*, 17(1), 26–34.
<http://dx.doi.org/10.24259/perennial.v17i1.13087>

Kadir, W., W, A. K., Awang, S. A., Hadi, R.,
(2013). *Analisis Stakeholder Pengelolaan
Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung ,
Provinsi Sulawesi Selatan. Balai Penelitian
Kehutanan Makassar , Sulawesi Selatan.*

Kartila, N., Ichsan, A. C., & Markum. (2018).
Kontribusi Hasil Hutan Bukan Kayu Kemiri
(*Aleurites Moluccana*) Terhadap
Pendapatan Petani HKm Tangga Desa
Selengen Kecamatan Kayangan Kabupaten
Lombok Utara. *Jurnal Belantara [JBL]*, 1(2),
89–100. [https://doi.org/https://doi.org/
10.29303/jbl.v1i2.64](https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jbl.v1i2.64)

Krisnawati, H., Kallio, M., & Kanninen, M. (2011).
*Aleurites moluccana (L.) Willd. : ekologi,
silvikultur dan produktivitas*. CIFOR, Bogor,
Indonesia.

Nappu, M. B. (2013). Keragaan Sumberdaya
Lahan, Pemanfaatan dan Produktivitas
Tanaman Pertanian Berbagai Daerah di
Sulawesi Selatan. *Seminar Nasional Inovasi
Teknologi Pertanian*, 487–499.

Pusat Litbang Kehutanan. (2010). *Rencana
Penelitian Integratif (RPI) Tahun 2010-2014 :
Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu*.
Badan Penelitian dan Pengembangan
Kehutanan.

Rahmanulloh, A., & Martini, E. (2013). *Kemiri di
Bantaeng: dulu dan kini*. [Artikel] Available
from : [http://kiprahagroforestri.blogspot.com/
2013/04/kemiri-di-bantaeng-dulu-dan-
kini.html](http://kiprahagroforestri.blogspot.com/2013/04/kemiri-di-bantaeng-dulu-dan-kini.html). Diakses tanggal 26 Maret 2020.

Rahmanulloh, A., Sofiyuddin, M., & Suyanto, S.
(2013). *Seri Agroforestri dan Kehutanan di
Sulawesi: Profitabilitas sistem penggunaan
lahan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi
Tenggara*. World Agroforestry Centre
(ICRAF) Southeast Asia Regional Program.
17p. <https://doi.org/10.5716/WP13042.PDF>

Yusran. (2005). Mengembalikan kejayaan hutan
kemiri rakyat. *Governance Brief. Juni 2005
Nomor 10*. CIFOR. Bogor., 1–4.